

Pengelolaan Keuangan Masjid: Studi Empiris pada Masjid Al Furqan Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Pulau Aia Nan XX Kota Padang

Muhammad Fadhillah Rizki^{1*}, Deviani²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: fadilruz@gmail.com

Tanggal Masuk:

25 Juli 2024

Tanggal Revisi:

31 Oktober 2024

Tanggal Diterima:

02 November 2024

Keywords: *Accountability; Ethnomethodological; Mosque Finance Management.*

How to cite (APA 6th style)

Rizki, M. F., & Deviani (2024). Pengelolaan Keuangan Masjid: Studi Empiris pada Masjid Al Furqan Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Pulau Aia Nan XX Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (4), 1680-1697.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i4.1994>

Abstract

The specificity of the problem formulation is how to manage mosque finances at the Al-Furqan Mosque. The aim of the research results is to find out the dynamics of the financial management practices of the Al-Furqan Mosque. The method used is a qualitative method using an ethnomethodological approach. This research is different from previous research because specifically this research is related to the financial management of mosques in the month of Ramadhan because in the month of Ramadhan there are many activities carried out at the Al Furqan Mosque such as Taraweh, Ramadhan Islamic Boarding School, Makjlis Taklim, Wirid Pemuda and other activities and the respondents in this study are mosque administrator and people that around the mosque. The conclusion of this research is that the financial management of the mosque has been running well, this is shown by the active role of the congregation directly in mosque activities, the programs have been running effectively, this can be seen from the active role of the leader in motivating all administrators to be able to serve the mosque congregation better by providing useful programs for mosque congregations and very clear cash flow reports. The suggestions given by researchers for further research are to carry out deeper research, both in terms of interviews with informants and data processing with more references. So that the information needed by researchers is more abundant and can be developed.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba di bagi menjadi dua yaitu entitas nirlaba pemerintahan dan entitas nirlaba non pemerintahan (Patawaran & Restuti, 2023). Perbedaan antara entitas nirlaba pemerintahan dan entitas nirlaba non pemerintahan berada pada orientasi profit, pelanggan donatur, dan pemerintahan (Oktaviani, 2019). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2018 dalam ISAK No.35 disebutkan bahwa “Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari

pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan”.

Salah satu bentuk organisasi nirlaba adalah masjid, yang merupakan tempat ibadah bagi umat muslim. Selain digunakan untuk beribadah, masjid juga digunakan untuk belajar Al-Quran, tempat silaturahmi antar umat Islam, tempat berbagi ilmu agama Islam, dan juga sebagai tempat tabungan akhirat untuk menyisihkan sebagian harta disedekahkan dan digunakan untuk pembangunan masjid, qurban, maupun kegiatan agama lainnya. Oleh karena itu masjid yang sumber utama dananya berasal dari donatur berkewajiban mengatur dan melaporkan penggunaan dana yang diterima (Siskawati et al., 2016). Pengelolaan keuangan masjid merupakan proses untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengawasan keuangan (Oktaviani, 2019). Pengelola keuangan masjid biasanya melibatkan masyarakat setempat sebagai pengurus.

Fenomena menarik yang ditemui di lingkungan objek yang diteliti adalah kesukarelaan masyarakat memberikan dana dan tenaganya untuk pendanaan, pembangunan, pengelolaan dan kegiatan Masjid Al Furqan. Fenomena gotong royong ini menunjukkan rasa kepedulian dan solidaritas yang tinggi di antara anggota masyarakat, serta komitmen mereka terhadap pengamalan agama Islam. Masyarakat sekitar mesjid biasanya memberi dana atau menawarkan tenaganya secara sukarela untuk membantu dana masjid.

Dari hasil wawancara dengan pengurus Masjid Al Furqon (2024) ada beberapa faktor yang mendasari fenomena ini yakni nilai keagamaan dan sosial. Agama Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia menekankan pentingnya bersedekah dan membantu sesama. Pemberian dana dan tenaga kepada masjid merupakan salah satu bentuk amal dan pahalanya dilipatgandakan oleh Allah SWT. Selain itu, dukungan terhadap masjid juga dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam pelestarian dan pengembangan tempat ibadah.

Riset sebelumnya terkait dengan pengelolaan keuangan masjid telah dilakukan oleh Oktaviani (2019) pada 5 masjid di Kota Malang dengan hasil penelitian bahwasanya 5 masjid tersebut sudah melakukan proses pengelolaan keuangan dengan terbuka dan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dengan baik. Pada penelitian Siskawati et al (2016) pada penelitiannya menunjukkan hasil kritik terhadap akuntabilitas masjid mengatakan bahwa internal kontrol dan pengawasan pengelola keuangan pada organisasi masjid masi lemah dan berkaitan dengan kinerja masjid terhadap pengelolaan kegiatan masjid yang tidak efektif dan rendahnya profesionalitas pengurus dalam hal tata kelola. Penelitian yang dilakukan oleh Rahim et al (2019) di Masjid Raya Makassar, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen dalam pengelolaan keuangan di Masjid Raya Makassar telah dijalankan dengan cukup baik, namun dalam prosesnya masih banyak hal yang perlu diperbaiki seperti pelaporan keuangan masih kurang dan belum adanya sistem yang terkomputerasi. Kemudian beberapa penelitian telah dilakukan tentang praktik akuntansi di Masjid oleh Ibrahim & Sulaiman pada tahun 2017, Adnan pada tahun 2013 hasil penelitiannya menjelaskan pentingnya akan kebutuhan akuntabilitas dalam praktik akuntansi di masjid-masjid seperti manajemen, pengendalian internal dan sistem anggaran.

Merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan di Masjid Al Furqan Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Pulau Aia Nan XX Kota Padang dan yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan masjid pada bulan Ramadhan. Masjid Al Furqan akan dijadikan objek karena pada bulan Ramadhan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Al Furqan seperti Taraweh, Pesantren Ramadhan, Makjlis Taklim, Wirid Remaja dan kegiatan lainnya.

Alasan pentingnya melakukan penelitian pada pengelolaan keuangan masjid disebabkan karena masjid diklasifikasi sebagai organisasi niralaba “murni” karena pendapatanya diperoleh darikontribusi dan penggalangan dana masyarakat sekitar, masjid

tidak menjalankan bisnis untuk menghasilkan pendapatan. Dengan demikian masjid menyediakan lingkungan yang unik untuk mengaitkan akuntansi khususnya pengelolaan keuangan.

Berdasarkan fenomena dan pembaruan pada penelitian ini, penelitian ini menggunakan teori legitimasi karena adanya penekanan kontrak sosial antara masyarakat dengan suatu organisasi, dengan kata lain ada kepentingan masyarakat harus dijawab oleh organisasi seperti penerimaan kas dari jamaah yang dikelola oleh pengurus masjid lalu dikembalikan kepada jamaah melalui proses pertanggungjawaban. Adanya legitimasi dari masyarakat terhadap pengurus masjid sebagai amal jariyah dan sebagai penerimaan masjid untuk dimanfaatkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan Masjid (Studi Empiris Pada Masjid Al Furqan Kecamatan Lubuk Begalung Kelurahan Pulau Aia Nan XX).”

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi

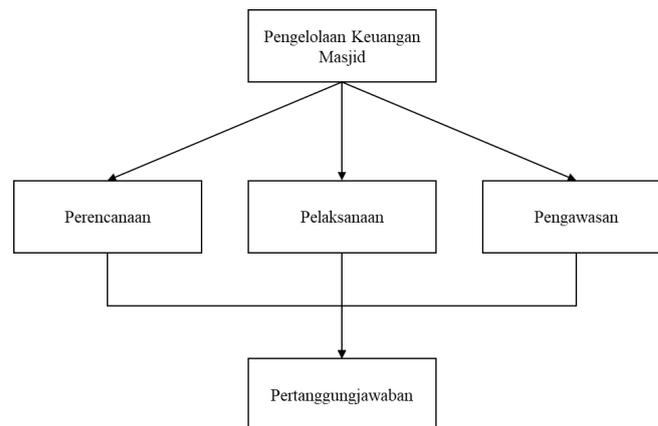
Legitimasi merupakan suatu hal yang penting dalam organisasi, mengandung batas-batas yang ditegaskan oleh norma-norma, reaksi, dan nilai-nilai sosial terhadap batas-batas tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperlihatkan lingkungan, menurut Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975, seperti dilansir Ghazali dan Chairi (2007: 411). Hubungan antara masyarakat dan masjid memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi baik dari segi agama dan sosial. Hubungan yang kuat antara masyarakat dan masjid akan menghasilkan legitimasi yang tinggi bagi masjid, yang pada gilirannya berdampak positif pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan Keuangan Masjid

Purba & Maksudi, (2020) mendefinisikan pengelolaan keuangan sebagai proses pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan, termasuk memperoleh dan menggunakan modal untuk suatu usaha. Putri & Lestari, (2019) menyatakan bahwa perencanaan keuangan diperlukan dalam pengelolaan keuangan guna mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai melalui investasi, tabungan, atau mengalokasikan uang. Pengelolaan uang yang baik akan membantu Anda menghindari terjebak dalam siklus keinginan yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa memiliki kemampuan merencanakan, mengatur, dan mengelola keuangan untuk mencapai tujuan jangka panjang adalah pengelolaan keuangan.

Andriyani (2021) menjelaskan pengelolaan masjid dimulai dari pengurus masjid diharuskan mampu untuk menyusun laporan keuangan setidaknya mencatat dengan jelas bagaimana alur dari uang masuk dan uang keluar di setiap masing-masing kegiatan. Laporan ini biasanya akan disusun oleh bendahara seminggu, sebulan atau setahun sekali yang akhirnya akan disampaikan secara tertulis kepada berbagai pihak seperti pengurus, donatur dan masyarakat. Dalam teori Legitimasi yang berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat mengharuskan pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan sangat penting dalam konteks pengelolaan keuangan masjid.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnometodologi. Asumsi dasar dari Etnometodologi modern berpendapat bahwa kebenaran pengetahuan hanya bersumber dari aktivitas sehari-hari berdasarkan metode yang digunakan masyarakat (Atkinson, 1988; Sukidin, 2002; Denzin & Lincoln, 2009). Dalam penelitian menggunakan pendekatan etnometodologi, penelitian ini berupaya memahami bagaimana pengurus dalam mengelola keuangan masjid dan menggambarkan aktivitas mereka sendiri. Etnometodologi berupaya memahami bagaimana orang melihat, menjelaskan, dan mendeskripsikan tatanan dunia di mana mereka hidup (Fakhrudin & Ahmad, 2008).

Instrumen penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peran peneliti sebagai instrumen penelitian berfungsi untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, dan melakukan pengumpulan data. Pada penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer yang peneliti peroleh dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Fokus studi etnometodologi adalah aktivitas yang bersifat rutin dan merujuk pada aktivitas keseharian kelompok bukan individu sehingga peneliti melakukan wawancara dilakukan pada tiga jenis informan yaitu dari Pihak Pengurus Masjid Al-Furqan, Donatur Masjid, dan Masyarakat setempat. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang.

Menurut Miles dan Huberman (1984), menyatakan bahwa aktivitas pada analisis data kualitatif berlangsung secara terus menerus sampe tuntas atau secara signifikan, sehingga nantinya data yang diperoleh bersifat jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Miles dan Huberman menyatakan bahwa: "data kualitatif bersifat membumi, kaya akan deskripsi dan mampu menjelaskan tentang proses. Agar data itu memberi makna maka dalam analisis yang dilakukan ditempuh langkah-langkah: 1) reduksi data; 2) display data; dan 3) kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Masjid Al Furqan terletak di Kecamatan Lubuk Begalung, Kelurahan Pulau Aia Nan XX Kota Padang Sumatera Barat. Sumber pendanaan berasal dari masyarakat setempat dan dari pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Setiap masyarakat yang mau menyumbangkan dananya, harus melapor dan bertemu langsung dengan pengurus masjid. Begitu juga jika masyarakat ingin mengetahui keadaan kas masjid pada saat ini, maka

masyarakat harus datang ke masjid dan melihat langsung catatan yang terdapat di dinding bagian dalam masjid tersebut. Jumlah donatur tetap masjid saat ini berjumlah 3 orang. Donatur tetap adalah donatur yang memberikan donasi rutin setiap bulan, biasanya donatur tetap ini memberikan bantuan berupa sedekah yang diberikan ikhlas untuk biaya operasional, sarana dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masjid.

Biaya operasional terdiri atas gaji staff, tagihan listrik dan air, kemudian untuk biaya sarana yaitu peralatan dan fasilitas kerja. Pengeluaran kepada masyarakat didasarkan pada hasil penerimaan kas yang telah dikurangi untuk biaya operasional dan sarana. Berdasarkan hasil wawancara, donatur tetap yang tidak meyerahkan donasinya secara rutin, hal ini disebabkan tidak adanya penagihan kepada donatur. Kemudian donatur tidak tetap di Masjid Al Furqan berjumlah 10 orang, Fungsi donatur tidak tetap mengacu pada individu atau entitas yang memberikan sumbangan atau kontribusi dalam bentuk tertentu kepada suatu organisasi atau tujuan amal, namun tanpa adanya kewajiban atau komitmen yang tetap. Mereka dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan atau keinginan mereka pada saat itu. Ini memberi mereka fleksibilitas untuk mendukung berbagai inisiatif atau proyek tanpa terikat oleh komitmen jangka panjang. Keadaan keuangan masjid per Januari 2023 adalah sebagai berikut:

**Laporan Keadaan Keuangan
Masjid Al Furqan
Parak Laweh Lubuk Begalung
Periode Januari 2023**

Tanggal	Uraian	Saldo Awal	Masuk	Keluar	Saldo Akhir
05/01/2023	Kas Anak Yatim	Rp 21.400.100	Rp 638.000		Rp 22.038.100
	Kas TPQ/TQA	Rp 3.560.200	Rp 212.000	Rp 1.300.000	Rp 2.472.200
	Kas Sosial Masyarakat	Rp 6.645.500	Rp 46.000		Rp 6.691.500
12/01/2023	Kas Anak Yatim	Rp 22.038.100	Rp 600.000		Rp 22.638.100
	Kas TPQ/TQA	Rp 2.472.200	Rp 884.000		Rp 3.356.200
	Kas Sosial Masyarakat	Rp 6.691.500	Rp 48.000		Rp 6.739.500
19/01/2023	Kas Anak Yatim	Rp 22.638.100	Rp 692.000		Rp 23.330.100
	Kas TPQ/TQA	Rp 3.356.200	Rp 159.000	Rp 10.000	Rp 3.505.200
	Kas Sosial Masyarakat	Rp 6.739.500	Rp 75.000		Rp 6.814.500
26/01/2023	Kas Anak Yatim	Rp 23.330.100	Rp 669.000		Rp 23.999.100
	Kas TPQ/TQA	Rp 3.505.200	Rp 634.000		Rp 4.139.200
	Kas Sosial Masyarakat	Rp 6.814.500	Rp 39.000		Rp 6.853.500
02/02/2023	Kas Anak Yatim	Rp 23.999.100	Rp 806.000		Rp 24.805.100
	Kas TPQ/TQA	Rp 4.139.200	Rp 156.000		Rp 4.295.200
	Kas Sosial Masyarakat	Rp 6.853.500	Rp 76.000	Rp 250.000	Rp 6.679.500

Pengelolaan keuangan masjid yang baik akan menciptakan kepercayaan pada jamaah untuk memastikan keberlanjutan kegiatan keagamaan dan sosial masjid, serta menguatkan ikatan antara pengurus, donator, dan masyarakat sekitarnya. Seluruh informasi keuangan sudah tertata dengan baik, informasi tersebut dicatat di papan tulis yang dipampang di salah satu dinding bagian dalam masjid dan dicatat dalam buku kas.

Hasil Penelitian

Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan peneliti kepada informan mengenai pengelolaan keuangan Masjid Al Furqan, adalah sebagai berikut:

Perencanaan

Kehendak semua pihak, terutama pengurus, sangat penting untuk mengembangkan fungsi masjid yang ideal. Termasuk di dalamnya keterlibatan pengurus dalam bidang perencanaan kegiatan, yang dalam hal ini sepenuhnya berada dalam lingkup pengurus masjid. Namun kenyataannya, kurangnya pengawasan dan persiapan dapat mengakibatkan pengeluaran yang berlebihan. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen dan staf harus menjadwalkan pertemuan rutin setiap tiga bulan. Rapat-rapat ini hendaknya dilaksanakan di ruang rapat Masjid Al Furqan dan seluruh pengurus wajib hadir. Agenda pertemuan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung di Masjid Al Furqan, baik kegiatan keagamaan maupun pembangunan seperti pemeliharaan gedung dan kegiatan bulan puasa. Rapat rutin tersebut memiliki tujuan ganda, yaitu merencanakan kegiatan yang akan dilakukan selama pengelolaan dan memutuskan apakah suatu kegiatan yang diusulkan, seperti salat tarawih pada bulan Ramadhan, layak dan berhak untuk dilaksanakan. Tiga kategori perencanaan yang digunakan Masjid Al Furqan adalah perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk memungkinkan ibadah yang damai di masyarakat dan kesempatan pendidikan bagi anak-anak saat mereka bermain di masjid, perencanaan jangka pendek mencakup rencana kegiatan harian dan mingguan termasuk melaksanakan shalat lima waktu, berbuka puasa bersama, dan mengadakan shalat Jumat. Sementara itu, rencana jangka menengah memerlukan kegiatan bulanan termasuk kajian rutin, acara terkait Ramadhan, dan menata ulang halaman masjid agar lebih lapang dan menarik dengan memanfaatkan taman yang baru dibangun. Sebaliknya, perencanaan jangka panjang melibatkan acara tahunan seperti Maulid Akbar yang mempunyai jangkauan cukup luas.

Dengan mengacu pada perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang telah dibahas di atas, program ini telah berkembang menjadi sebuah gerakan sosial—yaitu, upaya terkoordinasi yang mengambil identitas baru dan berkembang menjadi norma masyarakat yang tidak terucapkan. Program ini menempati tempat yang sangat tepat dalam perencanaan jangka pendek karena menggunakan dua alat penting, yaitu kombinasi pihak internal dan eksternal. Dalam hal ini jamaah menjadi pihak eksternal dan masjid menjadi pihak internal. Jika pemetaan telah berhasil diselesaikan, maka prosedur penilaian internal dan eksternal dapat diselesaikan. Perusahaan besar bahkan memiliki tim khusus yang melakukan pemetaan ini untuk memastikan keakuratan hasilnya. Informasi yang tepat sangat bermanfaat selama tahap analisis, yang pada gilirannya akan memperlancar proses pengembangan strategi. Di sisi lain, banyak usaha yang gagal karena kekurangan peta. Masjid Al Furqan telah menunjukkan melalui implementasi program ini bahwa masjid pun dapat menghasilkan kemajuan yang signifikan jika dijalankan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan kontemporer.

Kemudian, perencanaan jangka menengah mengungkapkan bahwa Ramadhan dipenuhi dengan acara-acara yang berdampak sosial selain yang berhubungan dengan puasa. Masyarakat secara keseluruhan memikul tanggung jawab bersama untuk memastikan bulan Ramadhan dipenuhi dengan acara keagamaan selain panitia. Dalam pesta megah pemujaan kepada Allah SWT, semua orang larut. Ramadhan menyebabkan kerusakan permanen. Masyarakat diimbau untuk membentuk dan membiasakan cita-cita Islam yang beragam melalui program satu bulan pendirian Masjid Al Furqan ini. Hal ini juga mempunyai komponen dakwah yang kuat karena menyebarkan ajakan kebaikan dalam jangka waktu yang

panjang dan dalam skala besar. Program ini telah menghasilkan perubahan hasil yang signifikan.

Lebih jauh lagi, cita-cita masjid mau tidak mau akan merasuk ke masyarakat mengingat perencanaan jangka panjang, anggapan masjid sebagai tempat relaksasi spiritual, dan prestasi pengelolaan yang dapat diakui dalam kehidupan masyarakat. Dampak jangka panjangnya mencakup meluasnya penerapan cita-cita Islam dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari oleh masyarakat. Hasil dari program ini mencakup peningkatan jumlah pendatang baru dan keterlibatan mereka dalam semua acara yang disponsori masjid. Meningkatnya jumlah jamaah salat berjamaah menjadi indikasi peningkatan tersebut.

Meningkatnya asimilasi budaya masjid ke dalam masyarakat adalah contoh pencapaian lainnya. Tanda yang paling kentara adalah ketika banyaknya peraturan masyarakat yang diambil dengan mempertimbangkan pertimbangan syariah. Pengurus masjid mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi kebijakan masyarakat dan pada akhirnya mencapai tujuan menjadikan budaya masjid menjadi budaya yang juga hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena mereka kini dipercaya sebagai tokoh masyarakat sebagai ketua RT dan RW.

Namun dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, Pengurus hanya membuat perencanaan secara garis besar saja. Bendahara akan memproyeksikan dana yang didapat dengan pembagian alokasi.

Ibu S menjelaskan

“Saya akan memulai dengan melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan dan sumber pendapatan masjid. Pertama-tama, saya akan bekerja sama dengan dewan pengelola untuk menetapkan anggaran yang realistis dan sesuai dengan tujuan serta kebutuhan masjid. Saya akan mengidentifikasi sumber pendapatan seperti donasi jamaah, zakat, infak, dan sumber lainnya, serta memperkirakan jumlah yang masuk dari masing-masing sumber tersebut.”

Untuk lebih jelasnya, Bapak CA menjelaskan mengenai perencanaan sebagai berikut

“untuk melakukan perencanaan, pihak pengurus meninjau sumber pendapatan yang meliputi donasi, sumbangan, dan pendapatan lainnya, dan memusyawarahkan setiap perencanaan kepada donator dan pengurus”.

Bapak FS juga menambahkan

“selama saya menjadi pengurus masjid, pengelolaan dana cukup baik. Sehingga apa saja yang akan dilaksanakan itu akan dikomunikasikan kepada pengurus masjid lain.”

Perencanaan yang matang terhadap pengelolaan keuangan masjid sangat penting untuk menjaga kelangsungan kegiatan keagamaan dan sosial. Perencanaan dimulai dari proses pembuatan anggaran meliputi menetapkan anggaran untuk pendapatan dan pengeluaran masjid berdasarkan kebutuhan operasional, pemeliharaan fasilitas, dan kegiatan keagamaan. Perencanaan anggaran mencakup gaji garin, biaya listrik dan air, pemeliharaan bangunan, serta program sosial keagamaan.

Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan masjid melibatkan serangkaian proses untuk mengelola dana yang diperoleh dari berbagai sumber seperti sumbangan, zakat, infak, sedekah dan pendapatan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Masjid Al-Furqan, seringkali tidak memiliki sistem dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan keuangan, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam pengelolaan dana, untuk itu pelaksanaan pengelolaan keuangan masjid perlu menampilkan pelaporan keuangan secara tertulis setiap bulannya secara rutin, termasuk pelaporan pemasukkan dan pengeluaran masjid. Melakukan pengelolaan terhadap setiap kegiatan untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan dari suatu kegiatan. Dari hasil wawancara dengan informan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan masjid ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masjid sudah bisa dikatakan 70% sudah terlaksana. Untuk saat ini, pembangunan di masjid dihentikan karena kekurangan dana tetapi pembangunan masih dilaksanakan karena adanya perjanjian MOU kepada pihak yang bersangkutan, jika sudah terkumpul dananya maka akan dilakukan pelunasan agar pembangunan masjid disegerakan untuk selesai. Dengan adanya perjanjian MOU ini, tentu semua pihak memiliki pandangan yang positif maupun negatif sesuai dengan hasil akhir atau dampak dari dilaksanakannya MOU.

Masjid pada umumnya bekerja keras untuk memastikan pengelolaannya tetap profesional dan alokasinya tetap tepat sasaran dalam setiap pernyataan yang dibuat saat melaporkan saldo infaq masjid. Semakin mudahnya aliran keuangan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan semakin baik pula perkembangan dakwah yang dijalankan, justru karena dana yang dihimpun masjid bukan untuk ditahan melainkan digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Jika masjid hanya dipandang sebagai tempat salat, maka masuk akal jika masjid akan kesulitan mengelola uang yang dimilikinya, karena paling banyak digunakan untuk renovasi, yang tentunya tidak selalu bisa dilakukan.. Jika masjid mengadopsi mentalitas sebagai pusat segala permasalahan yang dihadapi masyarakat yang dilayaninya, maka masjid tidak akan bingung bagaimana mengatur distribusi sumber dayanya. Bagaimanapun, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat yang terkait langsung dengan kebutuhan pendanaan, termasuk permasalahan usaha kecil, perekonomian, pendidikan, dan kebutuhan dasar seperti perumahan dan lapangan kerja. Akibat pemerataan pendapatan dan pengeluaran, keseimbangan tidak mungkin bisa mencapai tingkat setinggi itu. Visi dan tujuan masjid diwujudkan dalam gagasan bahwa semakin banyak uang yang dimiliki masyarakat, maka akan semakin makmur.

Bapak CA menyampaikan sebagai berikut

“di masjid tidak selalu ada dana, namun kalau ada dana yang terkumpul maka baru ada perencanaan anggarannya. Namun apabila dana yang akan dipakai tidak sesuai dengan apa yang ingin dilaksanakan namun dengan membuat perjanjian dengan pihak yang bersangkutan untuk melakukan pelunasan Ketika pelaksanaan tersebut sudah selesai namun, apabila tidak maka pihak pengurus masjid akan membuat sejenis MOU untuk pihak tersebut untuk melakukan pelunasan paling lambat selama 6 bulan atau melakukan penggalangan dana ke masyarakat.”

Bapak CA menjelaskan bahwa perencanaan anggaran tidak selalu dibuat dikarenakan dana yang masuk biasanya tidak dapat diprediksi selama periode tertentu. Dengan melakukan pelaksanaan tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan masjid dapat berjalan dengan baik,

memberikan manfaat yang maksimal, dan menjaga kepercayaan jamaah serta masyarakat sekitar.

Pengawasan

Proses mengawasi dan mengelola uang dan sumber daya keuangan yang digunakan untuk operasional dan kegiatan masjid dikenal sebagai pengawasan keuangan masjid. Pengawasan ini dapat berupa verifikasi seluruh penerimaan dan pengeluaran dana masjid yang terdokumentasi dengan baik, menetapkan protokol tertulis yang jelas untuk pengelolaan aset dan dana masjid, dan memastikan bahwa protokol-protokol ini dipatuhi secara rutin. Berdasarkan hasil observasi penelitian dan wawancara, proses pendokumentasian penerimaan dan pencairan dana masjid Al Furqan dimulai ketika donatur memberikan uangnya kepada bendahara, yang kemudian mencatat nama dan jumlah donasinya. Selanjutnya dana dari kotak amal dihitung secara berkala oleh dua orang atau lebih sebelum diberikan kepada bendahara. dan didokumentasikan sesuai dengan nama kotak amal dan jumlah yang dikumpulkan; setelah itu, dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan masjid baik reguler maupun tidak teratur. Serahkan kwitansi pembelian kepada bendahara setiap kali melakukan pembelian, kemudian catatlah. Setiap akhir bulan, uang yang terkumpul dari jamaah dan kotak amal dijumlahkan, dikurangi biaya operasional masjid. Apabila jumlahnya kurang maka dipotong dari kas masjid; jika jumlahnya lebih besar maka cadangan keuangan masjid akan bertambah. Ketua Takmir meninjau kembali laporan keuangan yang telah disiapkan. Ini akan dibagikan ke banyak sidang dan ditempel di papan pengumuman jika diperlukan.

Karena pengurus Masjid Al Furqan hanya mencatat arus kas—yakni pemasukan dan pengeluaran—laporan keuangan yang mereka berikan pun cukup lugas. Namun karena penyampaian yang lugas sehingga dapat dipahami oleh semua kalangan, laporan ini dapat diterima oleh masyarakat setempat dan gereja. Hasilnya, jamaah mendapatkan kepercayaan terhadap administrasi masjid dan cepat menyediakan uang ketika dibutuhkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Masjid Al-Furqan, masjid belum mampu mengelola sumber daya masyarakat secara tepat dan berkualitas. Kenyataannya adalah para pengurus masjid memiliki kesadaran dan keterampilan berorganisasi yang terbatas. Hal ini terutama berlaku dalam penerapan akuntansi di organisasi masjid, karena masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti kurangnya latar belakang keuangan di kalangan pengurus masjid. Meskipun demikian, pengurus masjid terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan masjid.

Ibu A menjelaskan sebagai berikut

“Saya juga akan melakukan monitoring secara berkala terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan atau penyimpangan dari anggaran. Jika ditemukan perubahan atau kebutuhan mendesak yang tidak terduga, saya akan berkomunikasi dengan dewan pengelola untuk meninjau kembali anggaran dan mengambil tindakan yang diperlukan.”

Masih mengenai pengawasan, Bapak CA menambahkan

“pemisahan tugas menjadi salah satu bagian dari pengawasan yang harus diterapkan, di mana ada pembagian tugas yang jelas antara yang mengelola dana, yang memeriksa transaksi,

dan yang melakukan laporan keuangan. Hal ini mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan.”

Begitu juga dengan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di masjid sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan sesuai dengan tujuan keagamaan, sosial, dan komunitas yang diharapkan.

Bapak GF memberikan tips agar seluruh masyarakat yang akan mengunjungi masjid menjadi nyaman dengan keterangan sebagai berikut

“Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kami memastikan bahwa penggunaan ruang dan fasilitas masjid untuk kegiatan-kegiatan eksternal atau internal dilakukan dengan bijak dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu kegiatan yang direncanakan harus memiliki tujuan yang jelas dan sasaran yang spesifik. Dengan begitu diharapkan masyarakat akan merasa nyaman dengan kegiatan apapun yang dilaksanakan di masjid ini.”

Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masjid dapat dilakukan dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan dapat memberikan manfaat maksimal bagi komunitas dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dalam melakukan pengelolaan keuangan masjid adalah suatu kewajiban untuk membuktikan dan menjelaskan bagaimana dana masjid dikelola dan di alokasikan. Pertanggungjawaban dalam hal ini meliputi bagaimana pengurus masjid dalam melakukan pelaporan keuangan secara terbuka dan transparan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak terkait mengenai pendapatan, pengeluaran, dan penggunaan dana masjid.

Dalam menerima dan menjalankan amanah, pengurus memiliki tanggungjawab untuk menjaga masjid, artinya sebagai pengurus masjid yang menerima amanah berusaha untuk memfungsikan masjid sesuai dengan yang seharusnya, tanpa ada kepentingan-kepentingan dari golongan tertentu. Meskipun masjid merupakan tempat untuk berkumpul, namun dalam hal ini pengurus membatasi untuk masuknya pengaruh politik yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Bentuk pertanggungjawaban kepada pihak lain yang kedudukannya sama, namun memiliki hak untuk mengetahui hasil pengelolaan keuangan tersebut. Pelaporan dan pengungkapan keuangan masjid dilaksanakan setiap Jum'at, dimana setiap pemasukan yang diterima secara langsung oleh pengurus dan penerimaan dari Jum'at lalu dibacakan didepan jama'ah masjid. Praktik akuntabilitas yang dilakukan pengurus masjid kepada para stakeholder dengan menyampaikan hasil laporan keuangan masjid di papan informasi yang dapat dilihat oleh semua orang yang datang ke masjid, baik itu jama'ah yang memberikan infaq dan sadaqah kepada masjid, pengurus-pengurus masjid yang ingin melihat perkembangan keuangan masjid, dan orang-orang yang datang dari wilayah lain untuk beribadah di masjid tersebut (musafir) dapat melihat dari adanya bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengurus kepada semua orang.

Dari percakapan bersama salah satu informan, dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh pihak pengurus dalam bentuk pelaporan keuangan. Namun, laporan keuangan yang dibuat masih manual dan sederhana yaitu hanya mencatat pengeluaran dan pemasukan saja. Meskipun sederhana, tetapi dalam mencatat pemasukan dan pengeluarannya ditulis secara rinci agar bisa dipertanggungjawabkan kepada jamaah dan masyarakat. Bapak GF menjelaskan sebagai berikut

“ketua masjid bertanggung jawab penuh namun pembagian pengawasan akan dilakukan sesuai dengan seksi yang bersangkutan seperti kalau untuk pembangunan yaitu seksi pembangunan, biasanya seksi pembangunan mengumumkan atau menempel di mading masjid berupa total uang masuk dan uang keluar dalam tiap minggunya.”

Cara pengurus masjid Al Furqan dalam bertanggung jawab yaitu dengan menjelaskan pemasukan dan pengeluaran masjid setiap minggunya pada setiap hari Jum'at. Pertanggungjawaban atas kegiatan masjid adalah prinsip yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh masjid sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, etika, serta hukum yang berlaku. Dengan memastikan semua yang dirancang terpenuhi, masjid dapat menjaga tingkat pertanggungjawaban yang tinggi terhadap komunitas dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan pengembangan positif dalam melayani kebutuhan spiritual dan sosial komunitas.

Pembahasan

Dari penggalan wawancara kita juga dapat menemukan makna bahwa pengurus masjid sadar akan tugas mereka adalah terus membangun masjid dan memberi pelayanan yang terbaik untuk masyarakat demi kemakmuran hidup bersama. Dalam upaya untuk memakmurkan masjid, terdapat beberapa langkah sebagai berikut:

Pertama menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini, pengurus masjid diharapkan dapat mengajak dan merangkul masyarakat untuk berpartisipasi dalam memakmurkan masjid. Partisipasi tersebut bisa dalam bentuk tenaga dan pikiran. Setiap kontribusi masyarakat dihargai karena masjid ada untuk masyarakat dan bukan untuk kepentingan seorangan. Partisipasi masyarakat perlu dijaga dan dikembangkan karena masjid tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Kedua, akuntabilitas kepada Tuhan, langkah ini dilakukan agar masjid sebagai organisasi sosial terhindar dari perpecahan dan kehancuran. Ketiga, musyawarah untuk mendapatkan legitimasi, tahapan ini adalah langkah yang penting untuk memastikan partisipasi dan dukungan dari umat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dana dan pengelolaan keuangan.

Dalam prakteknya, Masjid Al Furqan mengelola keuangan masjid dengan cukup baik dan sederhana. Bendahara membuat rincian transaksi setiap hari, kemudian dari rincian tersebut dibuat suatu laporan keuangan yang sangat sederhana. Pengelolaan keuangan dilakukan oleh pengurus dengan hati-hati dengan tujuan agar setiap transaksi tercatat dengan benar dan nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada jamaah. Namun beberapa kali ditemui *human error* seperti tidak tercatatnya transaksi pada tanggal yang sama dikarenakan lupa atau belum lengkapnya suatu struk pembelian jika membeli sesuatu untuk kebutuhan masjid.

Pemberdayaan Masyarakat

Inisiatif pemberdayaan masyarakat Masjid Al Furqan dijelaskan dari berbagai sudut pandang, antara lain terkait agama, pendidikan, ekonomi, serta seni dan budaya. Elemen penting dari semua kegiatan masjid adalah komponen keagamaan. Setiap tindakan yang dilakukan untuk menciptakan program pemberdayaan masjid perlu dimulai dan berkisar pada gagasan mendasar ini. Selain itu, pelaksanaan salat merupakan komponen utama praktik keagamaan. Kita bisa melihat indikator semaraknya sebuah masjid, misalnya seberapa aktif jamaahnya. Sholat berjamaah telah dilaksanakan lima kali sehari sejak pembangunan masjid

dimulai dan berlanjut hingga saat ini. Setiap tahun, jumlah jamaahnya meningkat. Berikut rincian kegiatan rutin yang dilakukan di Masjid Al Furqan selain kegiatan utama yang disebutkan di atas, dengan tujuan untuk merevitalisasi dan meningkatkan kesejahteraannya. Sholat berjamaah diadakan di masjid Al Furqan lima kali sehari, setiap hari sepanjang tahun, sebagai bagian dari program pengembangan keagamaan dan spiritual rutin. Pada hari Jumat, salat Jumat berjamaah diadakan di sana, Selain salat fardhu, Masjid Al Furqan menyelenggarakan berbagai acara selama Ramadhan. Diantaranya adalah salat tarawih dan witr, kultum ba'da dhuhur, tadarus, ceramah subuh, puasa berjamaah, salat Id tahunan (Idul Fitri dan Idul Adha), Maulid Agung, dan kajian rutin bulanan yang diselenggarakan di masjid setiap bulan kecuali Ramadhan. Pemateri diundang dari luar Sumbar.

Komponen penting dari peradaban masyarakat adalah pendidikan. Kehadiran masjid memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan taraf pendidikan di lingkungan sekitar. Komunitas di sekitar masjid mendapat manfaat dari adanya pusat pendidikan agama yang beroperasi di bawah wilayahnya. Fakta bahwa ada lebih banyak siswa setiap tahunnya adalah buktinya. Mengingat masa keemasannya, lembaga pendidikan keagamaan untuk anak kecil dinilai cukup signifikan. Sejak kecil, orang tua banyak mendapat bantuan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pembinaan akhlak. Kedudukan dan kepercayaan yang sangat baik di kalangan jamaah dan masyarakat luas, menunjang minat dan keinginan jamaah untuk “mendidik” putra-putrinya di Lembaga Pendidikan Masjid AL Furqan yang dinilai memiliki pengelolaan lembaga yang profesional dan didukung oleh sumber daya yang memadai. jumlah anggota staf pengajar dengan keahlian yang relevan.

Proses pemberdayaan masyarakat mencakup komponen ekonomi yang tidak kalah pentingnya. Faktanya, hal ini sering dianggap sebagai titik fokus dan sangat signifikan. Di Masjid AL Furqan, pengelolaan kotak amal merupakan salah satu inisiatif pemberdayaan ekonomi masjid yang berkelanjutan. Hasil dari kotak amal ini membantu kas masjid untuk terus berkembang sehingga pengurus dapat menggunakan uang tersebut baik untuk pembangunan non fisik maupun fisik. Berikutnya, sumbangan dari sponsor untuk pemeliharaan masjid dan kebutuhan lingkungan sekitar, antara lain zakat, infaq, dan sadaqah. Penerima dana titipan masyarakat ini adalah individu-individu yang memenuhi syarat. Penataan domain ekonomi dan distribusinya mencerminkan cita-cita pendidikan yang terdapat dalam komponen ekonomi. Uang milik masyarakat perlu ditangani dengan hati-hati. Dibutuhkan tenaga ahli di bidang keuangan dan manajemen, serta mereka yang memiliki tingkat integrasi tinggi. Selain itu, layanan ini akan memiliki nilai instruksional yang jelas.

Aspek Pemberdayaan Bidang Seni dan Budaya. Kegiatan Sholawat Nabi dan MTQ merupakan dua contoh inisiatif pemberdayaan bidang seni dan budaya yang dilakukan di masjid Al Furqan. Salat Nabi sering dilakukan di Masjid Al Furqan pada saat acara Tablig Akbar dan pengajian, serta lomba-lomba. Sebelumnya, sholawat Nabi dipanjkatkan sebagai bagian dari seni dan budaya Islam yang masih berkembang di nusantara. Al Furqan selalu terlibat dalam perencanaan, penjurian, dan pelaksanaan kegiatan MTQ karena berkontribusi terhadap pertumbuhan budaya Islam.

Ada banyak cara untuk menggunakan pemberdayaan masyarakat sehingga pengelola masjid berupaya menjadikan tempat tersebut ramah, inklusif, dan nyaman bagi semua orang, selain melakukan tugas administratif. Mereka bekerja sama satu sama lain dan menjaga rasa persatuan yang kuat untuk mengatasi setiap hambatan.

Bapak GF menjelaskan sebagai berikut

“ya pendekatan ini banyak bidangnya, salah satunya setiap hari raya Idul Adha masyarakat yang ingin berkorban dibentuk arisan kurban untuk siapa saja yang jumlahnya dalam setiap kelompok yang terdiri dari tujuh orang untuk 1 ekor sapi. Jadi yang ingin berkorban di masjid dianjurkan untuk segera mendaftarkan

namanya sebelum tiba hari raya Idul Adha, karena selain dapat meringankan beban ekonomi juga dapat dijangkau oleh masyarakat yang ekonomi dibawah yang mempunyai keinginan untuk melakukan kurban. Dengan melalui cara berkorban masyarakat bisa belajar untuk ikhlas berbagi kepada para mukmin lain, yang pastinya mereka yang kurang mampu. Dengan adanya kurban ini masyarakat yang kurang mampu juga ikut merasakan bagaimana indahnya Islam dengan adanya hari kurban tersebut.”

Sependapat dengan Bapak GF, Ibu A menjelaskan sebagai berikut :

“Pemberdayaan masyarakat bisa dalam hal apa saja, saya sebagai ketua majelis taklim mengusulkan Masjid mengadakan pengajian ibu-ibu ini agar para ibu-ibu tidak tertinggal pengetahuan agamanya. Pengajian ini dilaksanakan setiap minggu sekali, Pengajian ini diisi dengan metode ceramah, mengkaji kitab parukunan, dan Al-quran serta membahas moment tertentu seperti sekarang ini di Bulan Rajab, bulan Rajab termasuk bulan yang memiliki moment yaitu Isra’ dan Mi’raj Nabi Muhammad Saw.”

Secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat, fungsi masjid adalah tempat ibadah, selain dari pada tempat ibadah masjid juga berfungsi sebagai pusat pelayanan sosial, pendidikan, dan juga ekonomi. Masjid Al Furqan telah mempergunakan fungsi masjid tersebut sebagaimana fungsi masjid pada Zaman Rasulullah SAW. Masjid Al Furqan melayani dan menyelenggarakan segala pelayanan dan program untuk masyarakat. Adapun nilai layanan sosial yang dicerminkan dalam beberapa hal diantaranya, memahami karakteristik dalam melakukan pelayanan dan nilai kebersamaan, kepedulian serta empati masyarakat terhadap kelompok yang rentan, kepercayaan, dan spirit organisasi spiritual.

Akuntabilitas kepada Tuhan

Konsep akuntabilitas kepada Tuhan mengacu pada keyakinan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada Tuhan atau kekuatan spiritual yang mereka percayai. Akuntabilitas kepada Tuhan dibagi menjadi kesadaran spiritual, tindakan dan keputusan, pemeliharaan nilai-nilai moral, pengampunan dan pertobatan.

Akuntabilitas kepada Tuhan sering kali merupakan bagian integral dari praktek keagamaan dan spiritualitas seseorang, yang memberikan kerangka kerja moral dan etis yang kuat dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dapat memberikan motivasi bagi individu untuk bertindak dengan baik dan melakukan perbuatan yang membawa kebaikan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat.

Ibu RT menjelaskan sebagai berikut

“menjadi donatur masjid mungkin ya berupa suatu amalan lah bagi kita. Kita melaksanakan kegiatan sosial, alhamdulillah kita jadikan sebagai suatu ibadah bagi kita dalam menyumbangkan sedikit penghasilan ke rumah Allah.”

Bapak FS juga memberikan tanggapan sebagai berikut

“kalau di masjid itu kan kita tau, itu rumah bersama, dan uangnya pun uang bersama, masalah Bersama dan tanggung jawab Bersama. Jadi walaupun sudah ada pembagian masing-masing seksi kita mesti tetap belajar dan menerima masukan dari pihak-pihak lain seperti penasehat, tokoh masyarakat yang memberikan masukan sehingga pihak-pihak lain yang diluar kepengurusan tetaplah sama pentingnya apalagi kalau dikaitkan kepada kepengurusan keuangan karena itu

uangnya adalah uang Bersama sehingga keluar masuknya uang harus jelas dan transparan.”

Selain berperan sebagai pelaksana, pengurus juga berperan dalam mengendalikan atau memantau pelaksanaan pengelolaan keuangan guna mengurangi potensi sumber kesalahan. Berikut ini yang kemudian diperjelas dari pernyataan Pak ED:

“Setiap rencana harus dimulai dengan niat yang baik dan tujuan yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan moral. Ini berarti memprioritaskan kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama.”

Dengan demikian, pengelolaan keuangan masjid tidak hanya berkaitan dengan kewajiban akuntabilitas kepada jamaah, tetapi juga sebagai amanah kepada tuhan, yang mendorong pengurus masjid untuk menjalankan praktik yang lebih transparan dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip spiritual ini menjadi dasar yang kuat dalam memandu praktik pengelolaan keuangan masjid dengan penuh kejujuran dan Amanah kepada tuhan dan jama'ah.

Menerapkan nilai-nilai moral dan spiritual secara praktis merupakan salah satu cara untuk menerapkan akuntabilitas kepada Tuhan dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadi maupun organisasi. Pengurus masjid mempraktikkan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dengan menampilkan hasil laporan keuangan pada papan informasi yang dapat dilihat oleh seluruh pengunjung, termasuk pengurus masjid yang ingin memantau perkembangan dan jamaah yang melakukan infaq dan sadaqah ke masjid. keuangan masjid, serta mereka yang datang dari tempat lain untuk salat di sana (musafir) dapat mengamati dari cara pengurusnya meminta pertanggungjawaban setiap orang. Bapak FS menjelaskan sebagai berikut :

“Menedukasi diri dan orang lain tentang pentingnya akuntabilitas kepada Tuhan bisa melalui ceramah, diskusi kelompok, atau program pelatihan yang menekankan nilai-nilai keagamaan dan Masjid AL Furqan telah melaksanakan hal tersebut.”

Sebagai pengurus masjid yang menerima amanah, ia berupaya menjalankan masjid sebagaimana mestinya, bebas dari kepentingan kelompok tertentu. Dalam menerima dan menjalankan amanah tersebut, pengurus mempunyai tanggung jawab untuk merawat masjid. Masjid merupakan tempat berkumpul, namun dalam hal ini pihak pengelola melarang tokoh politik dengan agenda tertentu untuk masuk. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa organisasi masjid, khususnya masjid komunitas, biasanya tidak memiliki seperangkat peraturan yang mengikat secara hukum dan hanya berfokus pada norma-norma sosial dan adanya nilai-nilai spiritual, sehingga menimbulkan hambatan dalam menjalankan tugasnya.

Membuat setiap pilihan dan tindakan, baik secara individu maupun dalam suatu organisasi, bertanggung jawab kepada Tuhan berarti melakukan hal tersebut dengan cara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral dan spiritual.

Bapak CA menjelaskan sebagai berikut

“Menyediakan laporan yang jujur dan lengkap mengenai kegiatan dan keputusan yang diambil, baik dalam konteks pribadi maupun organisasi. Kemudian kita juga mengikuti pembinaan atau bimbingan rohani untuk terus meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai spiritual.”

Diharapkan masjid dapat menjalankan fungsi mereka sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan dengan baik, serta memastikan akuntabilitas yang tinggi terhadap Tuhan dalam setiap aspek kehidupan masjid.

Musyawarah untuk Mendapatkan Legitimasi

Musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi, dialog, dan pertukaran pendapat antara berbagai pihak yang terlibat dalam suatu masalah atau keputusan. Pada struktur musyawarah untuk mendapatkan legitimasi, Utari et al (2022) menyebutnya sebagai sistem kaidah moral. Pada fase legitimasi tersebut, tidak hanya pengurus masjid saja yang membenarkan upaya kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi juga para jama'ah masjid juga turut mendukung dan membenarkan upaya yang dilakukan oleh pengurus di area masjid. Dukungan dari jama'ah masjid tersebut tidak serta merta muncul karena upaya pengurus masjid saja, tetapi juga dikarenakan adanya dukungan dominasi struktur dari pihak pengurus masjid yang turut melakukan legitimasi. Maka dari itu, struktur legitimasi ini juga tidak bisa lepas dari struktur dominasi dan struktur signifikansi. Ketiga struktur tersebut dalam praktek sosialnya dilakukan secara rutin dan berulang dalam lintas ruang dan waktu.

Musyawarah untuk mendapatkan legitimasi adalah proses yang memerlukan perhatian terhadap beberapa aspek penting agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Bapak CA menjelaskan

“Kita memiliki jadwal untuk rapat membahas mengenai apa saja kegiatan yang akan dilakukan, atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk itu, kami pastikan bahwa masyarakat yang mengikuti musyawarah memiliki akses ke informasi yang relevan sebelum musyawarah dimulai. Ini termasuk data, laporan, dan dokumen pendukung.”

Untuk mendapatkan legitimasi memerlukan pendekatan yang terstruktur dan inklusif, sehingga semua pihak yang terlibat merasa didengar dan keputusan yang diambil dapat diterima secara luas.

Bapak DA menjelaskan

“tujuan musyawarah sudah harus ditentukan dengan jelas dan dipastikan semua peserta memahami apa yang ingin dicapai. Nantinya modetaor atau pemandu musyawarah akan menjelaskan aturan dan tata tertib musyawarah, termasuk waktu berbicara, cara menyampaikan pendapat, dan mekanisme pengambilan keputusan.”

Pertanggungjawaban terhadap musyawarah untuk mendapatkan legitimasi adalah proses di mana para pemimpin atau penyelenggara musyawarah memberikan laporan dan klarifikasi mengenai keputusan yang diambil dan memastikan bahwa proses musyawarah tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan partisipasi. Musyawarah seringkali menjadi cara yang efektif untuk mengambil keputusan dalam konteks organisasi, masyarakat, dan pemerintahan, karena memungkinkan untuk memperhitungkan berbagai sudut pandang dan membangun dukungan yang luas untuk keputusan yang diambil.

Dalam kepemimpinan masjid dibutuhkan nya suatu pengetahuan dari masing-masing jobdesk dalam kepemimpinan, dikarenakan jika tidak adanya pengetahuan bagaimana cara pengurus dalam melaksanakan masing-masing tugasnya.

Ibu RT merangkum poin dari musyawarah ini sebagai berikut

“Dalam melakukan permusyawaratan yang dilakukan masjid, semua orang berhak untuk ikut tanpa terkecuali walaupun hanya masyarakat biasa, dan juga masyarakat kan sudah sepatutnya masuk, ikut dan mengawasi jalannya musyawarah tersebut sehingga setiap keputusan yang dilakukan oleh masjid dapat langsung diketahui oleh masyarakat.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan musyawarah agar pengelolaan keuangan masjid lebih baik, dan tentunya diperlukannya pengetahuan yang cocok terhadap masing-masing bidang pengurus. Dalam melaksanakan kepengurusan, tentu harus ada pengetahuan yang harus diketahui oleh pengurus dan dari mana mereka mengetahui jobdesk mereka masing-masing.

Tanggapan dari Ibu S

“kalau mami ya dari youtube dan teman teman yang paham di bidang akuntansi ya, karena jaman sekarang sudah canggih terhadap pengetahuan apa saja yang akan diketahui.”

Bapak CA memberikan tanggapan sebagai berikut:

“mungkin kalau bapak pengetahuan ini ya dari otodidak dan sering bertanya kepada pihak-pihak lain ya, soalnya bapak kebetulan tamatan teknik sipil dan juga ditempatkan di seksi pembangunan, jadi adalah sedikit pengetahuan yang ada dari diri sendiri”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat kita simpulkan bahwa para pengurus masjid tidak harus memiliki latar belakang yang sesuai dengan tanggungjawab mereka, namun dengan adanya rasa ingin tahu yang tinggi serta menerima masukan dari pihak-pihak lain sehingga tanggungjawab yang diberikan dapat dijalankan dengan baik.

Masjid Al Furqan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan adanya fungsi ganda yang berarti selain sebagai tempat ibadah, masjid bisa sebagai tempat penggalian ilmu keagamaan. Dibuktikan dengan kegiatan rutin yang telah disebutkan diatas yang telah mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan & Amrulloh (2022).

Dalam pengelolaannya, penerimaan dana oleh Masjid Al Furqan diakui sebagai kas masuk yang dicatatkan secara tertulis, kemudian dicatatkan melalui excel oleh bendahara masjid sesuai dengan nominal yang diterima. Begitu juga dengan pengeluaran masjid, diakui dan dicatat sebagai pengurang kas. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hyndman (2020). Kemudian kekurangan lain ditemui dalam sisi pengurus yang belum terbiasa dengan kata PSAK, maka penulis memberikan sedikit pengertian kepada pengurus mengenai istilah tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori legitimasi, legitimasi dalam konteks pengelolaan keuangan masjid merujuk pada proses pengakuan dan penerimaan masyarakat atau jamaah terhadap otoritas dan keabsahan dari cara pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus masjid. Hubungan legitimasi terhadap pengelolaan keuangan masjid sangat penting karena dapat mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi jamaah dalam kegiatan keagamaan dan sosial di masjid tersebut dan penelitian ini berhasil menegaskan bahwa adanya upaya menyamakan persepsi atau asumsi yang dilakukan oleh suatu entitas merupakan tindakan

yang diinginkan, pantas, atau sesuai dengan norma yang dikembangkan secara sosial sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus masjid.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan dari kegiatan yang telah dijalankan pada Masjid Al Furqan untuk program manajemen pengelolaan keuangan mesjid adalah masyarakat sekitar sangat antusias ketika mengikuti pengajian dan rangkaian acara keagamaan yang telah dibentuk pengurus masjid. Masyarakat dan juga pengurus masjid dapat melihat manfaat kegiatan-kegiatan tersebut, yakni menambah pengetahuan pada bidang keagamaan secara mendalam dan kompleks dan dapat memahami manajemen pengelolaan keuangan mesjid, khususnya akuntansi mesjid bagi pengurus masjid. Berdasarkan sesi tanya jawab yang dilaksanakan pada saat diskusi, tidak ada kesan buruk dari masyarakat selama pelaksanaan rangkaian kegiatan yang telah dibahas pada bab pembahasan, baik dari segi sarana dan prasarana maupun penyampaian materi, hanya saja perlu dibuat dalam skala yang lebih luas. Kegiatan ini hendaknya tetap dipertahankan dan dilanjutkan secara berulang khususnya pada tanya jawab masalah keilmuan dan praktik akuntansi mesjid, khususnya tentang pembuatan aplikasi sistem informasi akuntansi mesjid.

Saran

Penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mengembangkan teori yang berbeda sehingga dapat terlihat variable mana saja yang sekiranya akan berbeban terhadap laporan keuangan masjid sehingga pada pelaporan keuangan yang dilakukan oleh masjid yang ada di Indonesia menjadi lebih transparan dan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya diharapkan mampu untuk memperbanyak responden dalam sehingga data yang akan digunakan dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2020). *Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Gereja*.
- Alfaiz, D. R., & Aryati, T. (2019). Pengaruh Tekanan Stakeholder Dan Kinerja Keuangan Terhadap Kualitas Sustainability Report Dengan Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 2(2), 112–130.
- Angelia, N., & Rudy J. P. (2018). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 1–8. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/akmen/article/view/196>
- Ayyagari, M. (2007). Firm Innovation in Emerging Markets. *Growth Lakeland*, 54(4), 38–45. <http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=VpOX8wbmtn8C&oi=fnd&pg=PA34&dq=Firm+Innovation+in+Emerging+Markets&ots=h5gHYsNC5d&sig=B4GROsZPmZ6FFG8Bckylk0t zI>
- Dhanani, A., & Connolly, C. (2012). Discharging not-for-profit accountability: UK charities and public discourse. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 25(7), 1140–1169. <https://doi.org/10.1108/09513571211263220>
- Gunadi, B. H., Prayudi, M. A., & Kurniawan, P. S. (2020). Penerapan Prinsip Habluminallah Dan Habluminannas Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Keuangan Masjid. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 11, Issue 1)*.

- Oktaviani, K. A. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid (studi kasus pada 5 Masjid di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(2), 4–8.
- Patawaran, N., & Restuti, M. (2023). Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip Good Church Governance Pada Gereja Toraja? *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(2), 415–427. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7261>
- Pramesvari, L. N. (2019). Fenomena Pengelolaan Dan Pelaporan Masjid Jogokariyan Yogyakarta Pada Aspek Mental, Fisik Dan Spiritual. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(3). <https://doi.org/10.32424/jeba.v21i3.1382>
- Purba, F., & Maksudi, M. Y. (2020). The Effect of Cash Turnover and Account Receivable Turnover on Returns on Assets in PT . Alexindo Mandiri Express 2015-2019 period. *Indonesian College of Economics*, 1–17.
- Putri, N. A., & Lestari, D. (2019). Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Tenaga Kerja Muda di Jakarta. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 31–42. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v1i1.61>
- Randa, F., Triuwono, I., Ludigdo, U., & Sukoharsono, E. G. (2011). Studi Etnografi: Akuntabilitas Spiritual Pada Organisasi Gereja Katolik Yang Terinkulturasi Budaya Lokal.
- Rokhlinasari, S. (2015). Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Sosial Responbility Perbankan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 7, 1–11.
- Sari, M., Mintarti, S., & Fitria, Y. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan organisasi keagamaan. *Kinerja*, 15(2), 45. <https://doi.org/10.29264/jkin.v15i2.4029>
- Siskawati, E., Ferdawati, & Surya, F. (2016). Pemaknaan Akuntabilitas Masjid: Bagaimana Masjid dan Masyarakat Saling Memakmurkan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 70–80. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7006>
- Susanto, I., Basalamah, S., & Rahim, S. (2019). Akuntabilitas Masjid: Studi Fenomenologi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Makassar. *Jurnal Economix*, 7(2), 26–35. 196. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p10><https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i05.p10>